

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa pembentukan negara Pakistan pada tahun 1947 merupakan salah satu fenomena geopolitik paling monumental di abad ke-20. Munculnya negara ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik kolonial Inggris di anak benua India, ketegangan identitas komunal antara umat Hindu dan Muslim, serta peran strategis organisasi politik Islam, yakni Liga Muslim India (*All-India Muslim League*). Periode krusial antara tahun 1937 hingga 1947 merupakan dekade penentu dalam perjuangan umat Islam India untuk memperoleh entitas politik tersendiri, dengan Liga Muslim India di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah berperan sebagai penggerak utama ide pembentukan sebuah negara Muslim yakni Pakistan.¹

Kebangkitan politik Islam dalam bentuk modern di India merupakan respons terhadap tekanan yang datang dari dua arah: dominasi kolonial Inggris dan pengaruh politik Hindu yang terfokus dalam tubuh Kongres Nasional India. Sejak awal abad ke-20, komunitas Muslim di India menyadari bahwa dalam sistem demokrasi mayoritas, eksistensi politik mereka sebagai kelompok

¹Abdul Razzaq Shahid dan Mahwish Naeem, “*Political Struggle Within Colonial System: A Study Of The All India Muslim League Politics, 1906–1937*”, *Journal Of Historical Studies* 3, No. II (2017), Hlm. 74

minoritas secara keseluruhan berada dalam posisi yang rawan.²

Sejak pendiriannya pada tahun 1906 di Dhaka, posisi dan peran Liga Muslim India dipandang berbeda oleh masing-masing aktor politik. Bagi pemerintah kolonial Inggris, Liga Muslim pada awalnya merupakan organisasi Muslim moderat dan loyalis yang dapat dijadikan penyeimbang terhadap tuntutan radikal Kongres Nasional India.³ Dukungan Liga terhadap kebijakan seperti separate electorates membuat Inggris menilai Liga sebagai mitra yang bersedia bekerja dalam kerangka konstitusional kolonial.⁴

Sebaliknya, banyak elit nasionalis Hindu di Kongres memandang Liga sebagai organisasi “komunal” yang memecah belah persatuan India dan menghambat proyek nasionalisme India yang sekuler dan terpadu.⁵ Pandangan negatif ini semakin menguat ketika Liga Muslim mulai menegaskan identitas politik Muslim yang terpisah dari mayoritas Hindu serta menuntut jaminan politik khusus bagi umat Islam.⁶ Selain itu, dukungan terhadap Liga Muslim India juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai pengalaman diskriminasi dan pelanggaran hak yang dialami umat Islam di India. Di sejumlah provinsi, kebijakan

²Ibid., Hlm. 75

³Sugata Bose dan Ayesha Jalal, “*Modern South Asia: History, Culture, And Political Economy*”, (London: Routledge, 2004), Hlm. 173-175.

⁴Barbara D. Metcalf dan Thomas R. Metcalf, “*A Concise History Of Modern India* “, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), Hlm. 197-198.

⁵Sugata Bose dan Ayesha Jalal, *Op.Cit.*, Hlm.115-116.

⁶Ibid., Hlm. 143-144

bahasa yang mempromosikan Hindi dengan aksara Devanagari untuk menggantikan posisi Urdu dalam administrasi dan pendidikan dipandang sebagai upaya meminggirkan identitas kultural Muslim serta mengurangi akses mereka terhadap jabatan birokratis.⁷

Di bidang keagamaan, pembatasan bahkan pelarangan penyembelihan sapi di beberapa wilayah dengan alasan menghormati sentimen mayoritas Hindu dianggap melanggar kebebasan umat Islam dalam menjalankan syariat, terutama pada hari-hari besar seperti Idul Adha.⁸ Pada masa pemerintahan provinsi yang dikuasai Kongres setelah pemilu 1937, Liga Muslim juga menuduh terjadinya diskriminasi dalam rekrutmen birokrasi, pemaksaan simbol-simbol nasionalisme Hindu seperti kewajiban menyanyikan lagu “*Vande Mataram*” di sekolah-sekolah negeri, serta kegagalan pemerintah melindungi komunitas Muslim dari aksi kekerasan komunal.⁹

Serangkaian pengalaman ketidakadilan ini memperkuat persepsi bahwa tanpa perlindungan politik yang kuat, umat Islam akan terus berada dalam posisi lemah dan rentan, sehingga mendorong mereka melihat Liga Muslim dan gagasan Pakistan sebagai jalan perubahan.¹⁰ Krisis representasi politik umat Islam

⁷Ian Talbot, “*Pakistan: A Modern History*” (London: Hurst, 1998), Hlm. 66-75 (Dinamika Liga Muslim Di Punjab/Sindh Pada 1937-1946).

⁸*Ibid.*, Hlm. 91-94.

⁹Sugata Bose dan Ayesha Jalal, *Op. Cit.*, Hlm. 173-174.

¹⁰Barbara D. Metcalf Dan Thomas R. Metcalf, *Op. Cit.*, Hlm. 197-198.

makin terlihat setelah pemilihan umum tahun 1937 yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan India 1935. Dalam pemilu ini, Kongres India meraih kemenangan besar dan membentuk pemerintahan di delapan dari sebelas provinsi, sedangkan Liga Muslim hanya memperoleh sedikit kursi dan gagal memperoleh kepercayaan politik di berbagai wilayah mayoritas Muslim seperti Punjab, Sindh, dan Bengal.¹¹

Kekalahan tersebut memaksa Jinnah dan para pemimpin Liga Muslim untuk mengevaluasi ulang strategi politik mereka. Sejak saat itu, dimulailah proses transformasi internal Liga Muslim dari sekadar partai elite menjadi gerakan massa umat Islam. Pentingnya dekade 1937–1947 dalam sejarah pembentukan Pakistan telah banyak dikaji oleh para sejarawan. Ayesha Jalal dalam karyanya *The Sole Spokesman* menekankan bahwa Jinnah tidak secara mutlak menginginkan partisi India, melainkan berusaha menggunakan tuntutan terhadap “Pakistan” sebagai alat negosiasi untuk memperoleh jaminan politik yang lebih besar bagi umat Islam dalam kerangka India federal. Namun kegagalan kompromi, terutama dalam upaya menjalankan Rencana Misi Kabinet tahun 1946, membuat partisi menjadi tak terelakkan.¹²

Konsepsi “*Two-Nation Theory*” atau Teori Dua Bangsa menjadi fondasi ideologis utama Liga Muslim dalam mengklaim

¹¹Fakhr-UI-Islam, “*The Decisive Decade Of Freedom Movement (1937-1947)*,” *Dialogue* 5, No. 1 (2010): Hlm. 52-53

¹²Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman: Jinnah, The Muslim League And The Demand For Pakistan* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), Hlm. 154-157.

bahwa umat Islam India merupakan bangsa yang terpisah dari Hindu dalam segala aspek agama, budaya, sejarah, dan sistem hukum. Muhammad Ali Jinnah, dalam berbagai pidatonya, menekankan bahwa persatuan India tidak akan mampu memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi umat Islam, karena kekuasaan politik secara otomatis akan berada di tangan mayoritas Hindu. Dalam Konferensi Lahore tahun 1940, resolusi yang kemudian dikenal sebagai "*Pakistan Resolution*" secara resmi menyatakan bahwa wilayah-wilayah mayoritas Muslim harus digabungkan ke dalam "unit-unit independen" untuk menjamin perlindungan agama, budaya, ekonomi, dan hak-hak sipil umat Islam.¹³

Namun, perjalanan menuju Pakistan bukanlah tanpa perdebatan internal. Liga Muslim menghadapi fragmentasi di berbagai provinsi. Di Bengal, meskipun mendapat dukungan kuat, konflik internal antara pemimpin seperti Huseyn Shaheed Suhrawardy dan Khawaja Nazimuddin menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu berjalan seragam. Dinamika di Bengal memperlihatkan betapa kompleksnya membangun kesatuan komando politik dalam tubuh Liga Muslim, apalagi ketika pemilu 1946 semakin memperuncing pertarungan kepentingan di tingkat daerah.¹⁴ Hal serupa juga terjadi di Sindh, di mana strategi Jinnah untuk merangkul para tuan tanah dan tokoh-tokoh sufi lokal

¹³*Ibid*, Hlm. 177

¹⁴Syed Umar Hayat dan Altaf Ullah, "*Reorientation Of Muslim Politics In Bengal (1937-1947): Myth And Reality*," *Journal Of The Research Society Of Pakistan* 55, No. 2 (2018): Hlm. 194-195.

seperti para *Pir*, menunjukkan betapa pentingnya pendekatan pragmatis dalam memenangkan basis dukungan rakyat. Para pemimpin lokal yang sebelumnya enggan mendukung ide negara Muslim, lambat laun berhasil diajak bergabung melalui diplomasi politik dan konsesi terhadap kepentingan lokal. Konsolidasi di wilayah seperti Punjab dan Sindh sangat menentukan bagi keberhasilan tuntutan partisi, sebab wilayah-wilayah inilah yang menjadi tulang punggung demografis dari entitas yang kelak menjadi Pakistan.¹⁵

Selain faktor internal umat Islam, dinamika hubungan antara Liga Muslim, Kongres Nasional India, dan pemerintah kolonial Inggris turut menentukan arah sejarah. Pemerintah Inggris, dalam upaya mempertahankan stabilitas kolonial dan menghadapi tekanan internasional pasca-Perang Dunia II, cenderung memainkan politik “*divide et impera*” yang memperkuat garis pemisah komunal antara Hindu dan Muslim. Kebijakan seperti pemberian sistem pemilihan terpisah (*separate electorates*) sejak awal abad ke-20 menjadi dasar legal dari pembentukan identitas politik yang terpisah.¹⁶ Perlu dicatat bahwa perjuangan Liga Muslim tidak seragam di seluruh wilayah India. Di Punjab, perlawanan terhadap Liga Muslim datang dari

¹⁵ Zahid Ali, “The All-India Muslim League’s Battle For Pakistan In Sindh 1937-1947: Quaid’s Strategies And Policies,” *Pakistan Journal Of History And Culture* 62, No. 2 (2021): Hlm. 40-42.

¹⁶ Vandana N. Singh, “1947: Rethinking British/Congress/Muslim League And The Study Of Partition,” *Law Mantra Journal* 2, No. 11 (2017): Hlm. 5.

Partai *Unionist* yang didukung oleh Hindu, Sikh, dan Muslim moderat. Namun setelah pemilu 1946, dukungan terhadap Liga Muslim meningkat drastis dan menunjukkan bahwa partai ini telah berhasil menjadi representasi sah umat Islam di anak benua India.¹⁷ Menjelang kemerdekaan, ketegangan politik berubah menjadi kekerasan komunal.

Peristiwa "*Direct Action Day*" pada 16 Agustus 1946 di Kolkata menjadi titik ledakan konflik antara Hindu dan Muslim yang menewaskan ribuan jiwa. Kekerasan ini menjadi indikator nyata bahwa koeksistensi damai antar komunitas tidak dapat lagi dijadikan landasan bagi negara yang bersatu. Dalam situasi tersebut, tuntutan Jinnah untuk Pakistan memperoleh legitimasi moral yang lebih besar, bahkan bagi sebagian kelompok Muslim yang semula bersikap moderat.¹⁸

Partisi India tahun 1947 bukan hanya menciptakan negara Pakistan, tetapi juga memunculkan pertanyaan reflektif dalam wacana sejarah politik Islam: Apakah Pakistan benar-benar merepresentasikan cita-cita negara Islam yang diidealkan Liga Muslim? Sejak awal, visi Jinnah lebih cenderung pada negara bangsa modern yang sekuler dengan perlindungan terhadap umat Islam, bukan negara berbasis hukum Islam. Hal ini kemudian menimbulkan diskursus panjang mengenai identitas Pakistan, yang bahkan hingga kini masih menjadi bahan perdebatan politik dan

¹⁷ Q. Abid Dan M. Abid, "*The Punjab Muslim League (1940–1947)*," *Journal Of The Research Society Of Pakistan* 48, No. 1 (2011), Hlm. 2-3.

¹⁸ Yasmin Khan, "*The Great Partition: The Making of India and Pakistan*" (New Haven: Yale University Press, 2007), Hlm 58-65.

akademik.¹⁹

Lebih jauh lagi, kelompok yang menolak Teori Dua Bangsa berpendapat bahwa perselisihan dan ketidakadilan setelah merdeka tidak bisa dipisahkan dari perkembangan nasionalisme yang berlangsung secara tidak merata. Nasionalisme Hindu, terutama dalam wujud ideologi Hindutva, benar-benar berperan dalam penyingkiran umat Muslim dalam beberapa situasi sosial dan politik.²⁰ Namun, mengaitkan semua fenomena diskriminasi hanya pada pengaruh dari agama yang dominan bisa berpotensi mengabaikan faktor-faktor lain, seperti ketidaksetaraan ekonomi, politik berdasarkan identitas pemilih, serta penggunaan agama untuk menggerakkan massa.²¹

Dalam kerangka ini, komunitas Muslim di India tidak hanya dilihat sebagai "korban tetap" dari dominasi mayoritas, tetapi juga sebagai pelaku sosial yang berperan dalam proses negosiasi identitas dan kewarganegaraan di negara yang sekuler. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengalaman Muslim di India sangat dipengaruhi oleh faktor wilayah, kelas sosial, serta keterkaitan dengan kekuasaan lokal. Hal ini menegaskan bahwa diskriminasi bersifat kompleks, bukan

¹⁹Stanley Wolpert, *"Jinnah of Pakistan"* (New York: Oxford University Press, 1984), Hlm. 337-340.

²⁰Christophe Jaffrelot, *The Hindu Nationalist Movement And Indian Politics* (New York: Columbia University Press, 1996)", Hlm. 25-40.

²¹Paul R. Brass, *"The Production Of Hindu-Muslim Violence In Contemporary India"* (Seattle: University Of Washington Press, 2003)", Hlm. 15-28.

tunggal, dan kontekstual.²²

Kelompok Islam yang bersikap moderat dan menolak pembentukan Pakistan menegaskan bahwa kehadiran umat Muslim di India adalah bagian penting dari sejarah dan budaya subkontinen yang bersifat campuran. Dengan demikian, mereka memandang Teori Dua Bangsa sebagai konsep ideologis yang justru memperburuk pemisahan bukannya menyelesaikan masalah pergaulan antar kelompok. Dalam sudut pandang ini, diskriminasi yang terjadi setelah pemisahan lebih baik dipahami sebagai kegagalan dari proyek nasionalisme yang inklusif, bukan sebagai bukti adanya ketidakmungkinan untuk hidup berdampingan antara dua kelompok agama.²³

Perjuangan Liga Muslim India tidak hanya merupakan respon terhadap ketimpangan struktural kolonial dan ancaman dominasi mayoritas, tetapi juga upaya strategis untuk membentuk suatu tatanan politik baru di Asia Selatan. Liga Muslim memanfaatkan celah-celah dalam sistem kolonial, dinamika internal umat Islam, serta diplomasi internasional untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kajian terhadap peran Liga Muslim dalam proses pembentukan Pakistan bukan sekadar rekonstruksi sejarah institusi politik, melainkan juga bagian dari wacana sejarah politik Islam dalam era modern. Dengan latar belakang yang telah dituliskan di atas penulis tertarik untuk

²²Asghar Ali Engineer, “*Communalism In India* (New Delhi: Vikas Publishing, 1984”, Hlm. 112-130

²³Ayesha Jalal, *Op.Cit.*, Hlm. 4-12.

melakukan penelitian lebih mendalam hingga mengetahui Peran liga muslim India terhadap pembentukan negara Pakistan dengan mengangkat judul “Peran Liga Muslim India dalam Pembentukan Negara Pakistan: Kajian Sejarah Politik Islam (1937–1947).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan 2 pokok masalah utama yang menjadi fokus kajian historis sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-politik di India sehingga mendorong terbentuknya Liga Muslim India pada masa kolonialisme Inggris?
2. Bagaimana peran Liga Muslim India dalam keberhasilan pembentukan negara Pakistan tahun 1947?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman historis yang mendalam mengenai proses terbentuknya negara Pakistan melalui peran politik Liga Muslim India dalam kurun waktu 1937 hingga 1947.

1. Untuk mengetahui kondisi sosial-politik anak benua India di bawah kekuasaan kolonial Inggris serta latar belakang kemunculan Liga Muslim India sebagai reaksi atas ketegangan komunal Hindu-Muslim
2. Untuk mengetahui strategi-strategi perjuangan politik yang digunakan oleh Liga Muslim India dalam mewujudkan cita-cita pembentukan negara Pakistan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian historis mengenai peran Liga Muslim India dalam proses pembentukan negara Pakistan pada rentang waktu tahun 1937 hingga 1947. Batasan ini ditetapkan untuk mempertajam fokus kajian dan mencegah perluasan analisis yang melampaui kerangka temporal dan tematik penelitian sejarah yang telah ditentukan. Secara tematik, penelitian ini tidak mengkaji seluruh aspek politik Islam di India secara umum, melainkan hanya menitikberatkan pada peran organisasi Liga Muslim India dalam upaya institusional, ideologis, dan politis menuju pendirian Pakistan.

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah politik Islam, khususnya dalam konteks perjuangan pembentukan negara berbasis identitas keagamaan. Memperkaya literatur akademik tentang dinamika gerakan politik Islam di bawah kolonialisme dan bagaimana transformasinya menjadi kekuatan nasionalis. Menunjukkan relevansi pendekatan sejarah deskriptif- analitis dalam memahami proses pembentukan negara melalui aktor politik keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan historis kepada mahasiswa dan peneliti sejarah mengenai peran Liga Muslim India dalam perjuangan politik umat Islam.

Menjadi referensi akademik dalam pembelajaran sejarah modern

Islam, sejarah kolonial Inggris, serta proses partisi India–Pakistan. Menyediakan perspektif kontekstual bagi pengambil kebijakan dan peminat studi kawasan dalam memahami akar konflik dan politik identitas di Asia Selatan.

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kompleksitas sejarah pendirian Pakistan dan tantangan integrasi identitas Islam dalam pembentukan negara.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis berusaha mengkaitkan dengan beberapa penulisan sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adinda Mastari Lubis berjudul *Kontribusi Muhammad Iqbal Terhadap India-Pakistan Tahun 1876–1938*. Skripsi ini disusun pada tahun 2019 sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sejarah dan Peradaban Islam di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi pemikiran dan gagasan Muhammad Iqbal dalam proses panjang perjuangan umat Islam India menuju pembentukan negara Pakistan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan empat tahapan utama, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penulis menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) untuk menelusuri karya-karya pemikiran Iqbal, baik dari tulisan filosofis, pidato, maupun karya sastra (puisi) yang berkaitan

dengan gagasan negara Islam dan kebangkitan umat Muslim India. Isi pembahasan dalam skripsi ini mencakup latar belakang sosial-politik India pada masa kolonialisme Inggris, biografi Muhammad Iqbal, serta kontribusi pemikiran dan karya-karyanya terhadap perkembangan ideologis umat Islam India. Penulis menekankan bahwa Muhammad Iqbal merupakan pelopor utama ide negara Islam modern di Asia Selatan dan memberi arah bagi pendirian negara Pakistan melalui “*Two-Nation Theory*”. Persamaan antara skripsi ini dan penelitian yang sedang disusun adalah keduanya membahas konteks perjuangan Umat Islam India dalam pembentukan negara Pakistan, serta menempatkan pemikiran Islam sebagai elemen penting dalam narasi sejarah. Namun, perbedaan terletak pada fokus kajian. Skripsi Adinda lebih menekankan pada kontribusi individual Muhammad Iqbal secara filosofis dan ideologis, sementara penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada peran kolektif institusi Liga Muslim India dalam kerangka politik praktis dan gerakan strategis antara tahun 1937 hingga 1947.²⁴

2. Skripsi yang disusun oleh Audina Almunawwarah dengan judul *Muhammad Iqbal (Kajian Historis Terhadap Peranannya Dalam Pembentukan Negara Pakistan)*. Skripsi ini diajukan pada tahun 2018 di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

²⁴Adinda Mastari Lubis, “Kontribusi Muhammad Iqbal Terhadap India-Pakistan Tahun 1876-1938” (Skripsi S1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

mengkaji pemikiran dan kontribusi politik Muhammad Iqbal dalam proses pembentukan negara Pakistan, khususnya dari sisi historis dan filosofis. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sejarah kualitatif, yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis dan teologis. Penelitian ini berfokus pada analisis isi pustaka, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan pemikiran Iqbal. Pendekatan multidisipliner ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana konsep-konsep keislaman, seperti ummah dan negara Islam, diartikulasikan dalam konteks kolonial dan modern oleh Iqbal. Pembahasan utama dalam skripsi ini mencakup latar belakang kehidupan dan pendidikan Muhammad Iqbal, evolusi pemikirannya dari nasionalisme ke pan-Islamisme, serta kontribusi puisinya dalam membentuk kesadaran politik Muslim India. Penulis juga menguraikan bagaimana Iqbal memberikan inspirasi ideologis kepada Liga Muslim India dalam menyusun platform perjuangannya. Persamaan dengan penelitian ini terlihat pada titik bahasan mengenai pentingnya ideologi Islam dan wacana politik dalam pembentukan negara Pakistan. Namun, perbedaan mencolok terdapat pada pendekatannya. Skripsi Adinda bersifat multidisipliner dan menempatkan Iqbal sebagai sentral figur, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik yang lebih fokus pada dinamika organisasi Liga Muslim India, strategi gerakan, dan keterlibatan aktor-aktor

politik kolektif antara tahun 1937– 1947.²⁵

3. Artikel karya Ayesha Jalal yang berjudul *The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan*, diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 1994. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Muhammad Ali Jinnah dalam memperjuangkan Pakistan, serta strategi politik yang ia gunakan sebagai juru bicara tunggal umat Islam India dalam menghadapi tekanan dari Kongres Nasional India dan pemerintah kolonial Inggris. Jalal menggunakan pendekatan sejarah naratif dan analitis, dengan metode penelitian berbasis arsip, dokumen resmi, dan pidato-pidato politik. Dalam karyanya, Jalal memaparkan bagaimana Jinnah memainkan peran ganda: sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak politik Muslim dan sebagai negosiator yang berusaha menggunakan isu “*Pakistan*” sebagai alat tawar dalam pembentukan negara federasi India. Persamaan antara karya ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan terhadap peran strategis Liga Muslim India dalam pembentukan Pakistan. Namun, terdapat perbedaan penting dalam ruang lingkup analisis. Karya Jalal lebih menekankan pada sosok Jinnah sebagai aktor utama, sementara dalam penelitian ini perhatian difokuskan pada institusi Liga Muslim secara menyeluruh baik secara struktural, ideologis,

²⁵Audina Almunawwarah, “Muhammad Iqbal (Kajian Historis Terhadap Peranannya Dalam Pembentukan Negara Pakistan)” (Skripsi S1, UIN Alauddin Makassar, 2018).

maupun peran kolektifnya dalam perjuangan politik Islam.²⁶

4. Artikel *The All-India Muslim League's Battle For Pakistan in Sindh 1937–1947: Quaid's Strategies and Policies* yang ditulis oleh Zahid Ali, dimuat dalam *Pakistan Journal of History and Culture*, Vol. 62, No. 2, tahun 2021. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menelaah strategi politik Liga Muslim India di wilayah Sindh, khususnya peran diplomasi Muhammad Ali Jinnah dalam menjalin kerja sama dengan elite lokal seperti tuan tanah dan tokoh sufi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah deskriptif dengan pendekatan politik dan sosial, serta mengandalkan sumber- sumber lokal dan arsip provinsi. Dalam artikelnya, Zahid Ali menjelaskan bahwa keberhasilan Liga Muslim India di Sindh sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam merangkul kekuatan tradisional dan membangun aliansi strategis menjelang pemilu 1946. Persamaan antara artikel ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada analisis strategi politik Liga Muslim dalam konteks kolonial Inggris. Perbedaannya adalah bahwa artikel Zahid Ali lebih bersifat lokal (*fokus Sindh*), sedangkan penelitian ini mengambil ruang lingkup nasional yang mencakup berbagai wilayah seperti Punjab, Bengal, dan Sindh.

G. Landasan Teori

Dalam kajian sejarah politik, pemilihan teori yang tepat menjadi fondasi penting dalam menafsirkan realitas masa lampau

²⁶Ayesha Jalal, *Op.Cit.*, Hlm. 145-150.

secara ilmiah dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori multidimensi yang mencakup **Teori Politik Identitas, Teori Nasionalisme Religius, dan Teori Politik Islam** sebagai kerangka analisis terhadap peran Liga Muslim India dalam proses pembentukan negara Pakistan pada periode 1937–1947. Penggunaan ketiga teori ini dipandang relevan karena fenomena pembentukan Pakistan tidak hanya merupakan peristiwa politik, tetapi juga menyangkut konstruksi identitas keagamaan, nasionalisme, dan ideologi Islam

1. Politik Identitas

Politik identitas menurut Fakhri-Ul-Islam (seorang akademisi, sejarawan, dan penulis terkemuka asal Pakistan), menjelaskan bahwa kelompok sosial, etnis, atau agama tertentu membentuk kesadaran kolektif atas identitasnya untuk memperjuangkan hak-hak politik, ekonomi, dan kultural dalam suatu sistem yang mereka anggap tidak adil atau dominatif. Dalam konteks India kolonial, umat Islam sebagai kelompok minoritas merasa terpinggirkan oleh dominasi mayoritas Hindu dalam tubuh Kongres Nasional India. Kondisi ini mendorong terbentuknya kesadaran politik Islam yang melihat bahwa umat Islam bukan sekadar kelompok agama, tetapi sebuah bangsa (nation) yang memiliki karakter historis dan kultural tersendiri.

Diskriminasi sistematis terhadap Muslim terjadi secara masif sejak Kongres India berkuasa di provinsi-provinsi penting setelah Pemilu 1937. Kebijakan-kebijakan seperti pelarangan penyembelihan sapi, penggantian bahasa Urdu dengan

Hindi, dan dominasi simbol-simbol Hindu dalam kurikulum sekolah menyebabkan keresahan luas di kalangan Muslim. Fenomena ini menciptakan keprihatinan identitas dan menjadikan “politik identitas” sebagai alat perlawanan kultural dan politis. Liga Muslim India kemudian mengambil peran sebagai wadah artikulasi politik bagi umat Islam dalam memperjuangkan eksistensi mereka di tengah tekanan dominasi mayoritas.²⁷

2. Nasionalisme religious

Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa nasionalisme tidak hanya dibentuk oleh faktor etnis dan politik, tetapi juga oleh agama sebagai elemen identitas pembeda dan pemersatu. Dalam perjuangan Liga Muslim India, Islam dijadikan basis ideologis untuk mengklaim bahwa umat Muslim India merupakan bangsa yang terpisah dari Hindu, dengan warisan sejarah, peradaban, dan hukum yang berbeda. Inilah dasar yang melandasi lahirnya konsep “Two-Nation Theory” yang menjadi ide sentral dalam Resolusi Lahore 1940.

Zahid Ali (seorang akademisi dan sejarawan yang berafiliasi dengan Departemen Sejarah di Quaid-i-Azam University (QAU) di Islamabad). menjelaskan bahwa semangat nasionalisme religius ini sangat tampak dalam strategi Liga Muslim di wilayah Sindh. Ia menguraikan bagaimana Jinnah secara aktif menggandeng para Pirs (tokoh agama sufi) dan tuan tanah lokal guna mengamankan dukungan rakyat Muslim

²⁷Fakhr-ul-Islam, *Op.Cit.*, 54

pedesaan. Dalam kasus Masjid Manzilgah di Sukkur, Liga Muslim mengeksploitasi isu keagamaan sebagai simbol marginalisasi Muslim, dan berhasil mengubahnya menjadi alat mobilisasi politik massal.

Ini menunjukkan bahwa agama bukan hanya keyakinan spiritual, melainkan juga alat perjuangan dan solidaritas dalam konteks kolonial yang represif. Nasionalisme Islam dalam hal ini bukan sekadar tuntutan politik, tetapi ekspresi dari pencarian identitas kolektif. Melalui perspektif teori ini, pembentukan Pakistan bukan dipahami semata sebagai keputusan politik, tetapi sebagai manifestasi nasionalisme berbasis agama, di mana umat Islam menuntut entitas politik yang mencerminkan keunikan identitas dan nilai-nilai mereka.²⁸

3. Politik islam

Teori Politik Islam Abul A'la al-Maududi, karena ia adalah seorang pemikir Muslim dari Asia Selatan yang hidup pada saat terjadinya proses pembentukan Pakistan dan membahas dengan jelas hubungan antara Islam, negara, dan kekuasaan. Namun, teori ini perlu dipadukan dengan teori politik identitas untuk dapat menjelaskan faktor sejarah dan sosial yang mendasari munculnya Pakistan.

Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dijadikan pijakan ideologis dalam membentuk sistem politik yang ideal menurut pandangan umat Islam. Liga Muslim

²⁸Zahid Ali, *Op.Cit.*, 45-46

India, meskipun tidak berbentuk organisasi keulamaan, membawa aspirasi umat Islam India yang menginginkan tatanan politik yang menjamin kebebasan menjalankan hukum Islam, sistem pendidikan, budaya, dan nilai-nilai sosial berbasis Islam.

Persaingan politik antara Kongres dan Liga, peran tokoh-tokoh keagamaan Islam tetap signifikan, baik sebagai pendukung moral maupun sebagai agen mobilisasi massa. Dalam berbagai pidatonya, Jinnah menyebut bahwa Islam adalah fondasi moral dan budaya yang menyatukan umat Muslim, dan karenanya perlu dijaga dengan pembentukan negara yang mampu mengakomodasi hukum dan norma Islam. Di sisi lain, meskipun Liga Muslim tidak secara eksplisit menyerukan berdirinya negara teokratis, nilai-nilai keislaman tetap menjadi referensi penting dalam retorika politik mereka.²⁹

H. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah (historis) karena objek kajian berupa proses politik pembentukan negara Pakistan pada periode 1937–1947. Penelitian sejarah dipahami sebagai proses sistematis dan objektif untuk mengkaji peristiwa masa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis bukti-bukti sejarah hingga diperoleh rekonstruksi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

²⁹Abul A'la Maududi, "*Hukum dan Konstitusi Islam* ", terjemahan Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1960)", Hlm. 147–150.

³⁰Anwar Sanusi, *Metode Sejarah* (T.T.: T.P., T.Th.), Hlm. 132–134.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini berupaya menggambarkan secara mendalam dinamika peran Liga Muslim India dalam proses pembentukan negara Pakistan berdasarkan sumber-sumber sejarah yang relevan. Secara umum, langkah-langkah metode sejarah meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik/verifikasi sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Louis Gottschalk menjelaskan bahwa penelitian sejarah mencakup pemilihan topik, pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan, pengujian keaslian serta kredibilitas sumber, dan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah yang logis.³¹ Wasino dan Endah Sri Hartatik merumuskan prosedur penelitian sejarah ke dalam tahapan penelusuran jejak dan sumber sejarah, kritik atau tafsir sumber, serta sintesis dan penulisan sejarah sehingga menghasilkan historiografi yang ilmiah.³²

Menurut Kuntowijoyo, terdapat lima tahapan penulisan metode historis yaitu:

- 1. PEMILIHAN TOPIK:** Tahap pemilihan topik merupakan langkah awal dalam pembentukan topik penelitian. Dalam memilih topik penelitian, penting untuk mempertimbangkan dua aspek utama: kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional berarti memilih topik yang

³¹Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer Of Historical Method*, 2nd Ed. (New York: Alfred A. Knopf, 1969), Hlm. 32–33.

³²Wasino Dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan* (Semarang: Unnes Press, 2018), Hlm. 13–14.

sesuai dengan minat dan kesenangan kita. Sementara itu, kedekatan intelektual merujuk pada penguasaan kita terhadap topik tersebut. Jika kita belum menguasainya sepenuhnya, maka kita harus mempelajari literatur yang relevan dengan topik yang dipilih.³³

2. HEURISTIK (PENGUMPULAN SUMBER): Heuristik, yang dapat didefinisikan sebagai mencari jejak daripada sumber, mencari sumber-sumber ini menjadi penting karena sejarah adalah tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Tanpa sumber, kita tidak bisa melihat langsung peristiwa tersebut. Kita tidak bisa melihat secara langsung peristiwa tersebut tanpa adanya bantuan sumber-sumber guna menjelaskan keadaan yang ada pada saat kejadian yang diteliti itu terjadi.³⁴ Dengan demikian, heuristik dapat dipahami sebagai tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian guna memahami peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Jenis sumber sejarah dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah bahan yang langsung berasal dari masa lalu, seperti dokumen, artefak, monumen, prasasti, dan lainnya. Di sisi lain, sumber sekunder adalah materi yang berasal dari masa kini tetapi membawa informasi tentang

³³Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2018), Hlm. 70-73

³⁴Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah : Metode Dan Praktik*, (Gresik: JSI Press, 2020), Hlm. 34-35

masa lampau, seperti buku, artikel, film, dan sebagainya.³⁵ Sumber-sumber primer yang digunakan antara lain berupa pidato Muhammad Ali Jinnah, dokumen Resolusi Lahore 1940, laporan sidang Kongres, dan arsip pernyataan Liga Muslim India. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku sejarah, artikel ilmiah, jurnal akademik, skripsi, serta tesis yang membahas sejarah politik Islam, India kolonial, dan partisi India-Pakistan.

3. VERIFIKASI (KRITIK): Setelah mengumpulkan sumber, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber untuk menilai otentisitas dan kredibilitasnya. Kritik merupakan kemampuan menilai sumber-sumber sejarah yang telah dicari (ditemukan). Kritik ini terdiri dari dua jenis: kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal mengevaluasi kualitas sumber berdasarkan kompetensi, kedekatan sumber dengan peristiwa, serta objektivitas dan konsistensinya. Kritik eksternal menilai keabsahan sumber dengan memeriksa tanggal penerbitan, bahan dokumen, keaslian sumber (asli atau salinan), dan faktor lain seperti usia dan jenis tulisan.³⁶

4. INTERPRETASI: Dalam metode sejarah adalah interpretasi, yang menuntut kecermatan dan sikap objektif dari sejarawan, terutama dalam menghadapi interpretasi

³⁵Wulan Juliani Sukmana, Metode Penelitian Sejarah, Seri Publikasi Pembelajaran, Vol. 1 No. ,2021, Hlm. 3

³⁶ Heryati, "Pengantar Ilmu Sejarah", Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017. Hlm. 66

subjektif terhadap fakta sejarah. Pada tahap ini, penting untuk memahami karakteristik peradaban atau kondisi umum yang sebenarnya, serta menggunakan pemikiran kritis untuk mencapai kesimpulan atau gambaran sejarah yang bersifat ilmiah. Pada tahap interpretasi ini, ilmu sejarah tidak berdiri sendiri; sebaliknya, diperlukan konsep-konsep dan pendekatan teoritis dari berbagai ilmu lain serta analisis yang mendalam.³⁷

5. HISTORIOGRAFI (PENULISAN): Historiografi merupakan Langkah terakhir dalam melakukan metode penelitian sejarah, yang mencakup cara menulis, menyajikan atau melaporkan hasil penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan dari sumber- sumber sejarah. Pada tahap ini penulis menggunakan kemampuan kritis dan imajinatif untuk menghasilkan tulisan yang menarik dan objektif. Historiografi merupakan penulisan sejarah yang dimulai dengan penelitian (analitis) terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu.³⁸

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara terstruktur ke dalam lima bab agar memudahkan pembahasan dan analisis. Adapun uraian sistematika tersebut adalah sebagai berikut.

³⁷Ibid., Hlm. 6

³⁸Anwar Nurpiddin, Samsudin, Dan Sulasman. Historiografi H. Rosihan Anwar Dalam Penulisan Sejarah Di Indonesia Tahun 1945-2011, *Altsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, Vol. 19 No. 1 ,2022,. Hlm. 72

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan dan kerangka berpikir penelitian.

BAB II SEJARAH MASUKNYA ISLAM KE ANAK BENUA INDIA DAN KEMUNCULAN LIGA MUSLIM INDIA Bab ini membahas konteks historis yang melatarbelakangi munculnya Liga Muslim India. Pembahasan meliputi: masuk dan perkembangan Islam di anak benua India, Kerajaan-kerajaan yang ada di India gambaran umum India Britania, kondisi sosial-politik umat Islam menjelang abad ke-20 serta Perbandingannya dengan umat lain yang ada di India, kebijakan kolonial yang memengaruhi hubungan Hindu–Muslim, serta proses lahirnya Liga Muslim India dan perkembangannya hingga menjelang pemilu 1937.

BAB III IDEOLOGI POLITIK ISLAM LIGA MUSLIM INDIA Bab ini mengkaji karakteristik ideologi politik Islam yang dikembangkan oleh Liga Muslim India. didalamnya dibahas Dinamika konsep politik Islam dikalangan Muslim India, Kongres Nasional India, serta Nasionalisme sekuler, politik identitas dan nasionalisme religius di kalangan Muslim India, perumusan *Two-Nation Theory*, serta gagasan mengenai negara Muslim yang kemudian diwujudkan dalam tuntutan pembentukan

Pakistan. Serta diberikan perbandingan dengan agama lain yang ada di India dan nasionalis yang ada di India.

BAB IV PERAN LIGA MUSLIM INDIA DALAM PEMBENTUKAN NEGARA PAKISTAN (1937-1947)

Bab ini merupakan inti penelitian yang menganalisis secara khusus peran Liga Muslim India dalam proses pembentukan negara Pakistan pada periode 1937-1947. Pembahasan meliputi transformasi Liga Muslim menjadi gerakan massa setelah pemilu 1937, strategi politik Liga dalam level pusat dan provinsi, peran Liga di Punjab, Bengal, dan Sindh, dinamika hubungan antara Liga Muslim, Kongres Nasional India, dan pemerintah kolonial Inggris, hingga rangkaian peristiwa politik yang berujung pada partisi India dan berdirinya Pakistan pada tahun 1947.

BAB V PENUTUP, Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran yang mungkin berguna bagi pengembangan kajian sejarah politik Islam dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran Liga Muslim India maupun sejarah pembentukan Pakistan.